

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Sejarah Singkat Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan Lembaga tinggi negara pemerintahan di Indonesia yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah dua hari kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 ia melantik dan mengangkat Mr. Dr.R.S.E Koesoema Atmajda sebagai ketua Mahkamah Agung yang pertama. Mahkamah Agung RI membawahi badan peradilan dalam lingkungan, peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara (Indrajaya, 2020).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai puncak tertinggi sistem peradilan di Indonesia, mengawasi berbagai macam pengadilan dalam dua cabang utama: Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus. Pengadilan Umum meliputi pengadilan negeri tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tertinggi. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Struktur organisasi ini memastikan sistem peradilan yang komprehensif dan terspesialisasi yang melayani berbagai kebutuhan hukum bangsa (Faqih, 2020). Pada saat ini, Ketua Mahkamah Agung dipimpin oleh Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin SH. MH. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2020 dan menjabat sampai tahun 2025.

2.2 Logo Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempunyai logo yang berbentuk perisai, dalam logonya mempunyai lambang dan memiliki makna tersendiri. Berikut merupakan logo Mahkamah Agung beserta penjelasannya:



Gambar 2.1 Logo Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sumber: mahkamahagung.go.id, 2024

Dalam logo Mahkamah Agung terdapat Lima garis melingkar di sekitar tepi lambang yang mencerminkan lima prinsip Pancasila. Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang membentuk lingkaran di bagian atas perisai menandakan institusi atau badan yang menggunakan lambang tersebut. Lukisan cakra yang terdapat dalam logo menggambarkan bahwa senjata Kresna merupakan sebuah panah beroda yang menjadi alat "Pamungkas" yang digunakan pada saat terakhir. Sementara itu, cakra adalah alat yang dipakai untuk mengatasi ketidakadilan. Terdapat perisai Pancasila yang terletak ditengah-tengah cakra yang memiliki arti memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Pada untaian bunga melati, masing-masing memiliki 8 bunga melati yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah. Untaian bunga melati memiliki sifat keteladanan dalam kepemimpinan. Kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang nyata seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.

2.3 Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

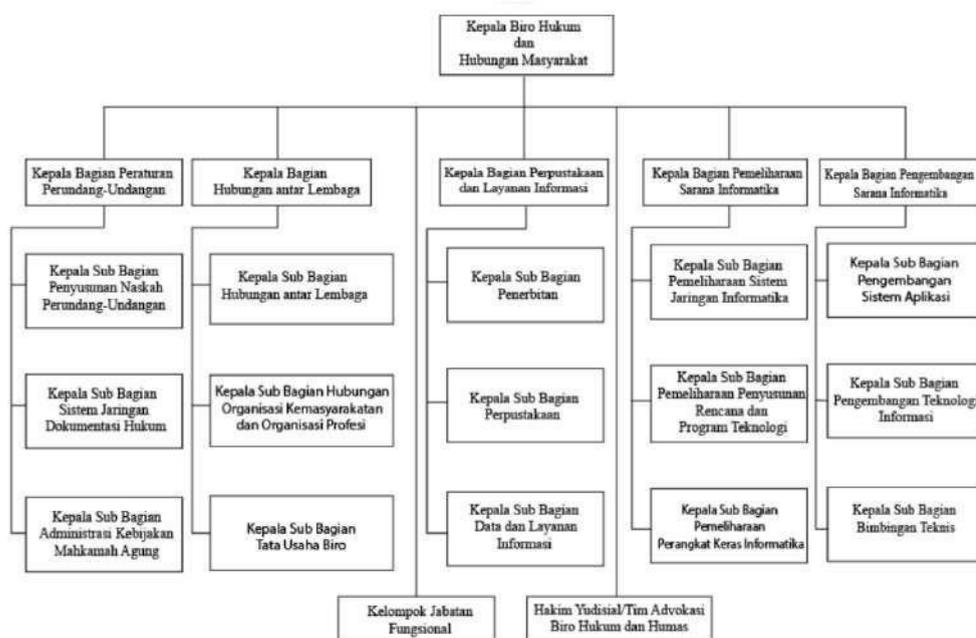
Visi utama Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Kemudian misi berfungsi untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu:

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2.4 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Mahkamah Agung
Sumber: Data Internal Mahkamah Agung, 2024

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai beberapa kepala bagian. Berikut adalah penjelasan tentang pekerjaan kepala bagian yang berada di bawah naungan Biro Hukum dan Humas:

- **Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undang**

Memiliki tugas yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Mahkamah Agung seperti mengharmonisasi peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung. Menyusun serta mengolah data tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum secara sistematis dan otomatis dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Mahkamah Agung.

- **Kepala Bagian Hubungan antar Lembaga**

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah atau kelembagaan negara lainnya, melaksanakan tata usaha biro dan instansi pemerintah/lembaga negara serta merilis berita seputar kegiatan pimpinan Mahkamah Agung.

- **Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi**

Memiliki tugas mencetak dan mengedarkan majalah tentang seputar Mahkamah Agung ke beberapa bagian internal Mahkamah Agung maupun satuan kerja di bawahnya. Bagian perpustakaan juga memfasilitasi aplikasi pengelolaan perpustakaan untuk satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Mengoordinasikan pelayanan data, informasi, dan mengelola kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dan statistik sektoral.

- **Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika**

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan jaringan sistem dan perangkat keras informatika serta pemberian dukungan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah nya.

- **Kepala Bagian Pengembangan Sarana Informatika**

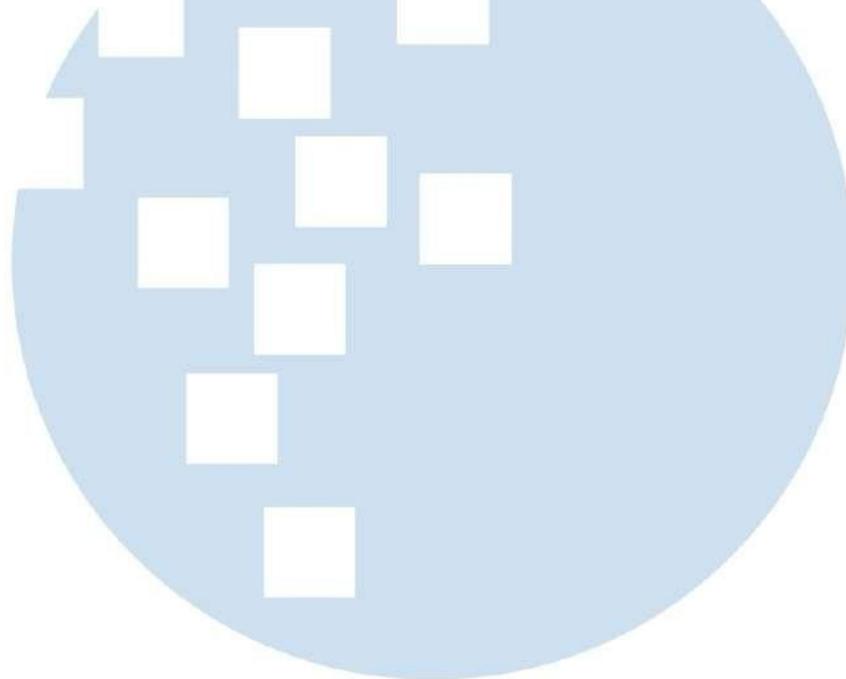
Memiliki tugas pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi. Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis sistem aplikasi dan teknologi informasi bagi pengguna.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional pada biro hukum dan humas dibagi menjadi beberapa jabatan seperti jabatan fungsional pranata komputer, penerjemah dan hubungan masyarakat.

- **Hakim Yustisial/ Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas**

Hakim yustisial Melaksanakan tugas advokasi yang ada kaitannya dengan Mahkamah Agung. Melaksanakan, mewakili atau mendampingi setiap tugas Kepala Biro Hukum dan Humas. Melaksanakan atau ikut serta dalam penyusunan kebijakan atau peraturan Mahkamah Agung.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA